

**M. AMIEN RAIS :  
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI**

---

*Irwan Supriadin J.<sup>1</sup>*

**Abstrak:**

*Demokrasi merupakan sebuah wacana yang tidak pernah usang untuk dikaji, pro dan kontar terhadap ide demokrasi yang terjadi sepanjang peradaban manusia di era modern, seakan menjadi sebuah batu ujian bagi konsep demokrasi dalam wajahnya yang sangat variatif. Disebabkan implementasinya yang sangat interpretatif, maka M. Amien Rais mencoba memberikan penafsiran makna demokrasi sesuai dengan konteks keIndonesiaan. Sebagai tokoh yang concern dengan ide demokrasi, Amien mencoba memberikan pencerahan melalui ijtihad dan sikap politiknya untuk menggugah rasa nasionalisme kepada generasi muda sebagai modal dalam membangun bangsa dan negara.*

**Kata Kunci: Demokrasi – Nasionalisme - Pendidikan Politik**

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen STIT Sunan Giri Bima

## Pendahuluan

Diskursus tentang hubungan Islam dan demokrasi selalu menjadi aktual dalam perbincangan para pemikir dan akademisi sepanjang sejarah muslim dari abad klasik hingga modern. Membincang demokrasi tentu tidak dapat melepaskan diri mengenai hubungan Islam dan negara, hingga mengkaji tentang konsep-konsep penyelenggaraan tata negara.

Dalam lintasan sejarah pemikiran, terjadi perbedaan yang sengit dalam melihat hubungan antara Islam dan demokrasi, polarisasi tersebut disebabkan konsep demokrasi yang relatif baru dan tidak terdapat dalam kajian literatur Islam klasik. Di samping itu, ta konsep yang berasal dari Barat itu selalu dicurigai sebagai produk bangsa “kafir” yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebahagian pemikir muslim. on

Polarisasi pandangan mengenai hubungan Islam dan demoitukrasi setidaknya terbagi menjadi 3 kelompok. *Pertama*, Anti-demokrasi, faham ini beranggapan bahuwa ajaran Islam bersifat universal yang mencakup berbagai hal terkait dengan kehidupan manusia termasuk di dalamnya wawasan mengenai nilai-nilai yang bersifat utuh meliputi semua lapangan kehidupan manusia seperti ekonomi, politik sosial dan kebudayaan serta mengenai hubungan agama dengan negara, kelompok yang diwakili oleh Sayyid Quthb ini beranggapan Islam tidak membutuhkan konsep yang dibuat oleh manusia. Penolakan konsep demokrasi tersebut berdasarkan asumsi “persamaan” kedudukan bagi semua warga negara, serta ide “kedaulatan di tangan rakyat” yang berarti membatasi kekuasaan Tuhan.

*Kedua*, Pro-demokrasi, kelompok yang diwakili oleh Yusuf Qardhawiy ini menegaskan bahwa konsep Islam sangat dekat dengan demokrasi. Ide Kebebasan, persamaan hak di mata hukum serta kebebasan dalam menentukan serta mengkritisi pemimpin merupakan ide dan semangat demokrasi yang sejalan dengan Islam.

Sedangkan kelompok *ketiga*, beranggapan bahwa ada persamaan Islam dan demokrasi meski harus diakui terdapat perbedaan antara Islam dengan demokrasi. Persamaan keduanya terletak pada upaya untuk memperjuangkan keadilan, persamaan dan kesejahteraan. Disisi

lain, penlolakan terhadap demokrasi disebabkan ide “Kedaulatan Rakyat” yang dianggap oleh Imam Khomeni sebagai sikap yang dapat mengantar kepada anti tauhid.

Di antara banyak pemikir muslim di abad modern adalah M. Amien Rais yang banyak memberikan kontribusi positif terhadap ide demokrasi di Indonesia, bahkan dalam sejarah gerakan reformasi Indonesia, Amien menempati posisi sebagai tokoh sentral pergerakan ini.<sup>2</sup> Reformasi telah menjadi simbol perjuangan yang berawal dari akumulasi dari serangkaian krisis yang begitu saja diabaikan oleh para penguasa Orde Baru. Kritik dan tanggapan dari masyarakat cenderung tidak diperhatikan oleh pihak penguasa. Kekuasaan bagaikan sebuah bangunan kokoh yang tidak dapat disentuh dan menolak gagasan-gagasan pembaharuan yang kemudian mengalami eskalasi sehingga menjadi sebuah pergerakan.

Sebagai salah satu generasi baru pemikir Islam yang hadir di saat terjadinya krisis multidimensi, Amien Rais berupaya membangun sistem serta kesadaran politik rakyat Indonesia melalui pemikiran dan sikap politiknya, Amien Rais dalam berbagai sikap dan tindakannya berupaya menyuarakan nilai-nilai moral serta etika kebenaran yang diselubungkan oleh penguasa, pernyataan dan kritikan yang lugas dan tegas dalam berbagai kesempatan merupakan sebuah metode pendidikan politik guna menciptakan sebuah kemajuan cara berpikir rakyat Indonesia, sehingga wajar bila banyak kalangan menilainya tidak hanya sebagai tokoh nasional tetapi juga sebagai tokoh internasional.<sup>3</sup>

Sebagai seorang pakar ilmu politik, Amien Rais aktif mengamati perkembangan politik di Indonesia dan mengkritisnya, sehingga ia dikenal sebagai salah seorang tokoh yang memiliki berbagai gagasan pemikiran yang diperlukan dalam mengantisipasi sejumlah persoalan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, dalam dunia politik tidak sedikit pengamat yang menjuluki Amien Rais sebagai politisi yang brilian,<sup>4</sup> sehingga pemikiran dan komentar Amien Rais tentang berbagai isu aktual yang sedang berkembang di tengah masyarakat, senantiasa menarik perhatian banyak orang.

---

<sup>2</sup> Muhammad Najib, *Membunuh Amien Rais* Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1998), 9.

<sup>3</sup> Muhammad Najib dan Kwat Sukardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1998), 184.

<sup>4</sup> Abd. Rahim Ghazali (Editor), *M. Amien Rais Dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1998), 164.

## A. Biografi Amien Rais

Amien Rais dilahirkan pada 26 April 1944 di Solo Jawa Tengah, dari sebuah keluarga yang berasal dari Muhammadiyah *Minded*.<sup>5</sup> ia memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1967 dari fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di samping itu ia memperoleh gelar sarjana dari fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1968, kemudian ia melanjutkan studi dan meraih gelar *Master Of Art* pada Universitas Notre Dome Amerika Serikat pada tahun 1974, dan untuk gelar Doktornya (Ph.D) diraihnya di Universitas Chicago Amerika Serikat pada tahun 1981 yakni dalam ilmu politik.<sup>6</sup>

Dengan latar pendidikan yang politik sentris dan topang dengan doktrin keagamaan Muhammadiyah yang sistematis, telah menjadikan Amien Rais sebagai sosok yang kritis, vokal dan sosok yang tidak bisa tinggal diam ketika melihat kezaliman, kediktatoran, ketidakadilan, seperti yang terjadi hampir selama Indonesia merdeka.<sup>7</sup>

## B. Demokrasi

Amien merupakan salah satu tokoh pakar ilmu politik yang getol dalam memperjuangkan tegaknya pilar demokrasi di Indonesia. Demokrasi menurut Amien, merupakan sistem politik terbaik bagi masyarakat manapun termasuk Indonesia “hanya demokrasi saja yang dapat menjamin eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dengan kemajemukan latar belakang kultur, etnis dan agama.”<sup>8</sup>. demikian Amien mengomentari tentang kemestian sebuah demokrasi bagi sebuah bangsa yang multikultural.

Demokrasi sebagaimana dipahami bersama merupakan sebuah sistem politik yang meletakkan kekuasaan serta kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat banyak, selain itu demokrasi juga meniscayakan terbentuk sebuah tatanan pemerintahan yang

---

<sup>5</sup> Ma'mun Murod al-Berebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara*, Cet. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 130.

<sup>6</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1994). 5

<sup>7</sup> Ma'mun Murod al-Berebesy, *Menyingkap....*,138

<sup>8</sup> M. Amien Rais, *Indonesia dan Demokrasi. Falam Syafi' I Ma'arif. Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia : Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, ( Jakarta: Paramadina, 1995), 149.

menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, keadilan serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta hanya demokrasilah yang sanggup mengakomodir berbagai kepentingan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat multikultural.

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, secara universal demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penerimaan demokrasi bagi Amien, tentu saja dengan berlandaskan realita masyarakat Indonesia. Karena Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak kultur, tradisi dan agama, sehingga untuk mengakomodir semua komponen tersebut, maka penerapan konsep demokrasi merupakan sebuah pilihan yang tepat.

Amien, sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah, mengemukakan tiga alasan dalam penerimaannya terhadap demokrasi:

1. Secara konsep dasar, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.
2. Secara historis, Nabi mempraktekan musyawarah dengan para sahabat.
3. Secara nasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka.<sup>9</sup>

Meskipun Amien memberikan apresiasi terhadap demokrasi ala Barat yang dinilainya mampu mengakomodir berbagai tuntutan serta kebebasan, namun Amien tidak sependapat sepenuhnya dengan ide "kedaulatan berada di tangan rakyat". Menurut Amien sebagaimana al-Maududi kedaulatan hanya di tangan Tuhan oleh karena itu sistem pemerintahan bernafaskan syari'ah menjadi sebuah keniscayaan.<sup>10</sup> Hal tersebut sejalan

---

<sup>9</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 81.

<sup>10</sup> Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah., dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan "Kedaulatan rakyat" dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah manusia atau negara harus tunduk pada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. V (Jakarta: UI Press, 1993), 166.

dengan pandangan Abu Hasan al Mawardi teoretikus Sunni yang tidak sepenuhnya menekankan pada aspek bentuk pemerintahan akan tetapi lebih fokus kepada internalisasi nilai-nilai syari'ah (*syariah value*) dalam sistem sebuah pemerintahan.<sup>11</sup>

Nilai syariah harus menjadi landasan berpijak dalam mengambil dan menetapkan kebijakan dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka Amien menolak jika agama tidak dijadikan dasar bagi pijakan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial dan politik. Sebab dalam kehidupan muslim bahwa setiap amal dan perbuatan memiliki konsekwensi teologis yang berimplikasi pada kehidupan pasca kematian. Paradigma pemikiran Amien tersebut sangat mirip dengan pandangan Abu A'la al-Maududi, Ikhwanul Muslimin dan Mohammad Nasir yang Berbasis pada konsep tauhid.<sup>12</sup>

Pandangan Amien tentang teori kedaulatan sepintas sama dengan pandangan para pendahulunya seperti al Maududi “bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan”, namun dalam konteks ke Indonesiaan Amien cenderung meletakkan kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat melalui politik representasi atau politik keterwakilan. Kesan inkonsistensi paham demokrasi yang dianut oleh Amien sesungguhnya merupakan sebuah pembacaan terhadap realitas kehidupan dimana demokrasi tersebut tumbuh. Namun, Kerangka demokrasi dalam pemikiran Amien Rais bertumpu pada konsep tauhid

Bagi Amien menghilangkan dasar-dasar agama dalam pemecahan permasalahan sosial dan politik berarti mereduksi makna Islam yang sebenarnya, sehingga akhirnya Islam hanya akan dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rohani saja, dengan kata lain agama kemudian hanya ditempatkan dalam ranah ritual ibadah *an sich*.

Demokrasi Bagi Amien itu dilandasi dengan 5 (lima) alasan, yakni :

---

<sup>11</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Cet II; (Jakarta; Darul Falah, 2006), 166.

<sup>12</sup> Menurut Amien, Tauhid adalah ajaran Islam yang paling penting dan esensial. Tauhid berasal dari kata *Wahhad, Yuwahhidu, Tawhidan* yang berarti mengesakan Tuhan (*Unity of The Godhead*). Dengan kalimat tauhid, manusia tidak hanya akan bebas dan merdeka, tetapi ia juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lain manapun. Lihat Idris Thaha. *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Cet. I (Bandung: Teraju, 2005), 137.

1. Demokrasi menjamin berlangsungnya *check and balance* antara mereka yang memerintah dan yang diperintah.
2. Demokrasi menjamin setidaknya empat macam kebebasan, yakni kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama dan kebebasan dari rasa takut.
3. Dalam sistem politik demokrasi berlaku prinsip *the people control the leader* dan bukan sebaliknya
4. Dalam alam demokrasi ada kesediaan untuk *sharing of power* dengan pihak lain agar tercapai keseimbangan antar kekuatan sosial politik dan
5. Demokrasi menjamin rakyat untuk menempatkan para wakilnya di lembaga perwakilan secara bebas.<sup>13</sup>

Apabila ditilik dari kelima aspek di atas, maka sangat jelas bahwa sebuah pemerintahan demokratis harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk melakukan *check and balance* serta mengawal jalannya sebuah pemerintahan, melalui sistem demokrasi rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui kontribusi positif yang bersifat konstruktif demi terciptanya *clean government*. Demokrasi juga mengandaikan keterbukaan pemerintah dalam memberikan kesempatan serta kebebasan rakyat dalam hal mengeluarkan atau menyatakan pendapat, kebebasan dalam memilih dan menentukan keyakinan serta menjalankan ibadah tanpa ada tekanan dan paksaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.

*The people control the leader* merupakan konsep keterbukaan sebuah pemerintahan demokratis dalam merespon kritikan terhadap berbagai kebijakan merupakan semangat yang harus tetap dilestarikan dalam alam demokrasi, dengan demikian hak kontrol tersebut tidak boleh terpasung dengan alasan menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga yang terjadi justru sebaliknya adalah *the leader control the people*. Kemunculan ide Amien tersebut dilatarbelakangi fakta historis rakyat Indonesia selama kurun waktu pemerintahan Orde baru yang nyaris mematikan daya kritis masyarakat dengan argumentasi menjaga stabilitas politik dan keamanan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 149.

Pada sisi yang lain demokrasi memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara *equality of opportunity* untuk mendapatkan kesempatan bagi pengembangan diri dalam mengaktualisasikan kemampuan guna menciptakan kesejahteraan.

*Sharing of power* merupakan konsep yang membedakan antara pemerintahan demokrasi dan pemerintahan monarki, kesediaan berbagi kekuasaan dijalankan untuk menghindari terjadinya monopoli kekuasaan yang berimplikasi pada timbulnya kekuasaan yang bersifat mutlak atau absolut sebagaimana jargon yang sering diungkapkan Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. Pernyataan tersebut memang telah teruji oleh sejarah bahwa dalam sebuah pemerintahan yang absolut maka akan cenderung tergiring pada sikap, perilaku dan mental korup

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam tiap episode sejarah peradaban manusia, merupakan salah satu isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejangad, karena wacana demokrasi mampu melintas batas-batas geografis, suku bangsa, agama dan kebudayaan.<sup>14</sup> Berdasarkan beberapa paradigma di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan Amien tidak ada pertentangan yang prinsipil antara Islam dengan demokrasi, baik dalam hal semangat maupun implementasi konsep dalam kehidupan kebangsaan.

### C. Pendidikan Politik

Salah satu komponen dalam tatanan demokrasi adalah pendidikan politik, urusan politik bagi Amien adalah urusan rakyat dan seluruh elemen bangsa, karena itu mereka harus diberi pendidikan politik. Diberbagai forum maupun tulisan-tulisan beliau mengenai politik, Amin selalu menawarkan gagasan tentang High Politics.<sup>15</sup> Yang diartikannya sebagai perilaku politik luhur, bukan sebagai politik tinggi yang mengesankan elitis.

---

<sup>14</sup> Artani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2001), 146.

<sup>15</sup> *High Politic*: Politik luhur, adiluhung dan politik yang berdimensi moral etis (politik amar ma'ruf nahi mungkar), bukan politik kasak kusuk mencari kursi di eksekutif dan legislative memperluas *vested interest* dan sebagainya. Lihat *Ada Undang Dibalik Busang* (ed) Hamid Basyaib dan Ibrahim Ali Fauzi, ( Bandung: Mizan 1997), 339.



Amien Rais sebagai salah satu generasi baru pemikir dan aktivis Islam berupaya membangun kesadaran politik rakyat Indonesia melalui pemikiran dan sikap politiknya. Kesiapan Amien mencalonkan diri sebagai presiden merupakan bagian dari pendidikan politik bagi warga negara sebagai bagian dari hak politik setiap warga negara. Di samping itu pilar pendidikan politik yang dibangun oleh Amien, adalah saat ia melontarkan wacana tentang pentingnya suksesi kepala negara. Wacana tersebut pertama kali disampaikan Amien dalam sebuah sidang Tanwir Muhammadiyah di *Islamic Center* Surabaya, Jawa Timur pada Desember 1993.<sup>16</sup>

Wacana suksesi terus digulirkan oleh Amien Rais karena situasi politik pada pemerintahan Orde Baru tidak sedikitpun memberikan ruang kepada publik untuk dipilih menjadi presiden, sehingga hal tersebut sangat kontra produktif dengan semangat demokrasi yang memberikan hak politik seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dipilih menjadi presiden atau wakil presiden. Meskipun wacana suksesi merupakan sebuah wacana yang dianggap tabu atau sensitif untuk dibicarakan.

Suksesi yang dimaksud Amien bukan berasal dari bahasa Belanda, yang artinya pergantian seseorang raja oleh seseorang putra mahkota, kata ini berasal dari bahasa Inggris : *Succession*, yang berarti *The right, act, or Procces by which one person succeded to the office, rank, estate, or the like, of another*,<sup>17</sup> suksesi kepemimpinan nasional berarti penyegaran atau pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional yang menyangkut Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, serta para anggota DPR dan MPR.<sup>18</sup>

Jadi jelas dalam pemikirannya bahwa Amien menghendaki terjadinya “suksesi dua pintu”, suksesi yang tidak hanya satu pintu, yakni hanya mengganti wakil presiden, akan

---

<sup>16</sup> Idris Thaha, *Demokrasi ...*115.

<sup>17</sup> The Random House Directory, (New York: Random House, 1988), 1321.

<sup>18</sup> M. Amien Rais, *Suksesi 1998 : Suatu Keharusan dalam Muhammad Najib*, dkk. *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, (Bandung: Gema Insani Press, 1998), 21-22.

tetapi suksesi dua pintu termasuk presiden.<sup>19</sup> Suksesi dua pintu merupakan solusi bagi kebuntuan sistem yang berlaku sejak orde baru di bangun.

Suksesi kepala negara dalam pandangan Amien merupakan bagian dari proses sunatullah, proses yang serasi dengan hukum alam, sejalan dengan rasionalitas, dan seiring dengan realitas.<sup>20</sup> Sehingga suksesi kepemimpinan bukan merupakan sebuah momok yang harus dihindari. Argumentasi suksesi dua pintu sebagaimana yang diusulkan oleh Amien merupakan jawaban terhadap kebijakan pemerintahan orde baru yang hanya menjadikan tradisi “suksesi” hanya untuk mengganti wakil presiden saja, sedangkan presiden sama sekali tidak tersentuh.

Ide Amien tentang suksesi tersebut selalu dikemukakan dalam berbagai forum. Suksesi tersebut juga pernah disinggung dan dipresentasikan pada sidang pleno pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta pada November 1993, bahkan hal tersebut diungkapkan kembali pada muktamar di Aceh Juli 1995.<sup>21</sup>

Gencarnya Amien dalam melontarkan ide suksesi sebenarnya bukan didasari oleh ambisi pribadinya untuk menjadi seorang kepala negara. Namun, hal tersebut lebih didasari oleh motivasi serta argumen penyegaran kepemimpinan serta agar muncul semacam alternatif pemimpin baru bagi masa depan politik Indonesia.<sup>22</sup>

Sebagai implementasi dalam melahirkan embrio bagi calon pemimpin alternatif sebagaimana yang diinginkannya, Amien telah sejak lama mendirikan suatu lembaga yang disebutnya sebagai wadah dalam memberikan bekal serta pendidikan politik bagi anak bangsa, untuk itu ia mendirikan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) yang merupakan lembaga riset yang lebih berorientasi kepada politik.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Sahal. *Amin Untuk Amien, dalam Muhammad Najib, dkk. Suara Amien Suara Rakyat*, (Bandung: Gema Insani Press. 1998), 97.

<sup>20</sup> M. Amien Rais, *Suksesi.....*,31.

<sup>21</sup> Idris Thaha., *Demokrasi Religius..*115.

<sup>22</sup> M. Amien Rais dkk. *Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan*, ( Yogyakarta: Pena Cendikia, 1998), 157.

<sup>23</sup> Lembaga ini didirikan pada bulan Juli 1999 di Yogyakarta dan di organisasikan oleh sejumlah sarjana yang telah memperoleh gelar Doktor dalam ilmu-ilmu sosial, sebagian di antara mereka adalah lulusan universitas-universitas di Amerika, sejak didirikan, minat utama PPSK adalah mengkaji masalah-masalah sosial, politik dan

#### D. Nasionalisme

Selain agenda besar memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia Amien juga merupakan salah seorang tokoh yang kerap memberikan pikiran kritis terkait dengan sikap nasionalisme, hal tersebut dapat terlihat dari pikiran-pikirannya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam hal berdemokrasi maupun supremasi sipil.

Wujud dari sikap nasionalisme tersebut, nampak pada penerimaannya terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, menurut Amien, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, walaupun peringkatnya berbeda, yang disebut pertama, Pancasila hanyalah sebuah ideologi buatan manusia, sementara yang kedua, Islam merupakan wahyu Allah.<sup>24</sup>

Sikap lunak Amien tersebut, dilandasi argumen bahwa sila-sila yang terdapat di Pancasila, tidak satu pun yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh ajaran Islam sehingga bagi umat Islam, terasa sangat bahagia kalau Pancasila yang indah itu benar-benar dipraktekkan secara konsisten, sebab dengan demikian berarti sebahagian dari ajaran Islam sudah dijalankan.<sup>25</sup>

Mengenai bentuk negara, pemikiran Amien sangat sejalan dengan Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa Tidak Ada Negara Islam.<sup>26</sup>

Adapun dasar pandangan Amien di atas, berangkat dari kenyataan sejarah bahwa baik al-Qur'an dan hadis secara spesifik tidak pernah berbicara tentang seluk beluk

---

budaya kontemporer Indonesia. Lihat Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 218.

<sup>24</sup> M. Amien Rais, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), xiv.

<sup>25</sup> M. Amien Rais, "Tidak ada Negara Islam", dalam Panji Masyarakat, No. 379, tahun 1982, sebagaimana dikutip oleh Ma'mun Murod al-Brebesy. 212.

<sup>26</sup> Negara Islam atau *Islamic State*, saya kira tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selamasuatu negara melaksanakan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan suatu masyarakat yang *egalitarian*, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia yang lainnya maupun eksploitasi golongan atas golongan yang lain, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai sebuah negara yang baik. Apakah artinya suatu negara menggunakan Islam sebagai dasar negara kalau hanya sekedar formalitas kosong. Lihat M.Amien Rais "Tidak Ada Negara Islam".....

serta bentuk negara menurut Islam berikut mekanisme atau aturan dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang disinyalir oleh beberapa kalangan pemikir Islam. Al-Quran dalam pandangan Amien Rais hanya memberikan nilai-nilai serta wawasan yang bersifat universal bagi pembentukan sebuah tatanan pemerintahan, sehingga bentuk negara maupun konsep pemerintahan merupakan bagian dari wilayah ijtihad.

Selain itu, dalam kenyataannya, berbagai negara yang berpenduduk Muslim ternyata berbeda dalam hal penerapan ajaran Islam dalam konsep kenegaraannya. Ada yang menerapkan konsep republik seperti Republik Indonesia dan Republik Islam Iran, ada juga yang menerapkan konsep Monarki Absolut seperti Kerajaan Arab Saudi.

Selain isu dasar negara, sikap nasionalisme Amien Rais tercermin ada pandangannya dalam melihat berbagai kebijakan pemerintah terkait berbagai kasus yang merugikan negara seperti kasus Busang, Freeport, sepatu Osis, dialog dan taubat nasional hingga pencalonan dirinya sebagai presiden.

Pemikiran dan sikap politik yang disampaikan Amien kepada pemerintah tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dalam serta merupakan sebuah visi ke depan dalam melihat masa depan bangsa yang tengah dililit oleh berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain sikap dan manuver-manuver sekaligus sebagai isyarat sebuah pembelajaran dan pencerahan politik bagi rakyat Indonesia, guna pembenahan internal dalam menghadapi persaingan dan percaturan di era global.

Pencerahan politik yang dilakukan oleh Amien didasari oleh kecintaannya kepada bangsa agar rakyat Indonesia terbiasa dan memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya, sekalipun berseberangan dengan sikap politik dan pendapat penguasa. Demikian pula dengan ide suksesi dan kesediannya mencalonkan diri menjadi presiden yang berulang kali digulirkan oleh Amien dalam berbagai kesempatan merupakan sebuah upaya desakralisasi jabatan kepresidenan yang cenderung tabu untuk dibicarakan dalam diskursus politik bangsa Indonesia.

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Amien bukan dilandasi oleh ambisi dan kepentingan pribadi, namun lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai sebuah ijtihad politik dalam membenahi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

## **B. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Amien, merupakan salah satu tokoh yang mengambil peranan penting dalam perjalanan politik bangsa. Sejak masa orde baru, ia telah tampil dengan pemikiran-pemikiran yang segar tentang demokrasi seakan berusaha untuk “menyadarkan” rakyat Indonesia bahwa demokrasi tidak sekedar dibuat slogan dan diucapkan. Namun, lebih dari itu harus diwujudkan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Bagi Amien, demokrasi merupakan konsep yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang sangat multi kultur, etnis, agama dan lain-lain, di samping itu tidak ada pertentangan antara Islam dengan demokrasi.

Implikasi dari demokrasi bagi Amien, adalah terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk berbicara, menyampaikan pandangan serta mencalonkan diri untuk menjadi Presiden. Selain memperjuangkan tegaknya demokrasi, sebagai tokoh nasionalis Amien sangat menyadari bahwa tidak mungkin untuk membentuk negara Islam di Indonesia, oleh karena itu, ia menerima Pancasila sebagai dasar negara. Serta tidak menyetujui dengan pernyataan bahwa dalam Islam terdapat konsep tentang negara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Cet. II: Jakarta Darul Falah, 2006.
- Ma'mun Murod Al-Berebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara* Cet. I ; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hamid Basyaib, (ed), *Ada Udang Dibalik Busang*, Cet. I; Bandung: Mizan 1997.
- Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998.
- Abd. Rahim Ghazali, (Editor), *M. Amien Rais Dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Najib, *Membunuh Amien Rais*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Muhammad Najib, dkk., *Amien Rais Sang Demokrat*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1993.
- Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*. Cet. I; Bandung: Teraju, 2005.
- Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*. Cet. I; Jakarta: Gema Media Pratama, 2001.
- M. Amien Rais, *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia dan Demokrasi. Falan Syafi'I Ma'arif. Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia : Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Sukses 1998 : Suatu Kebarusan dalam Muhammad Najib, dkk. Suara Amien Rais Suara Rakyat*. Bandung: Gema Insani Press, 1998.
- \_\_\_\_\_, dkk. *Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan*. Yogyakarta: Pena Cendikia, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri* . Jakarta: Rajawali Press, 1989
- Ahmad Sahal, *Amin Untuk Amien, dalam Muhammad Najib, dkk. Suara Amien Suara Rakyat*. Bandung: Gema Insani Press. 1998.
- The Random House Directory. New York: Random House, 1988.